PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN WAJO (Survey Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)

Ashawaluddin[1], Andi Syarifuddin[2], H. Sutardjo Tui[3]
[1,2,3]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

[1]wawanfocus@gmail.com, [2]andisyarifuddin67@gmail.com, [3]sutarjotui@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know and analysis the effect of technology toward revenue of PBB-P2 in Wajo Regency, and to know and analysis the information system toward revenue of PBB-P2 in Wajo Regency. The research approach used qualitative with type descriptive. Unit analysis namely Bapenda Wajo Regency with key informant as amount 6 (six) persons. The kind and data source consist of primary and secondary data. the gathering of data namely interview, observation and documentation. Data analysis in qualitative with the collection of information, data reduction, preparation of data, take of conclusion and verification. The result of research to found based on the result of data analysis showed that in partially the variable of technology have positive and significant toward revenue of PBB-P2 because to see from the result of t-test obtained the t-count more than t-table and significancy less from the probability value. Beside that from the regression analysis to showed the technology to direction with revenue of PBB-P2 which mean if the technology to increased so the revenue of PBB-P2 will be up. Based on the result of data analysis in partially the variable of information system have positive and significant toward revenue of PBB-P2 because to see from the result of t-test obtained the t-count more than t-table and significancy less from the probability value. Beside that from the regression analysis to showed the information system to direction with revenue of PBB-P2 which mean if the information system to increased so the revenue of PBB-P2 will be up.

Keywords*: Technology, Information System and Revenue of PBB-P2*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementrian Keuangan RI penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun 2015 peneriman negara disektor pajak sebesar Rp. 1.240,4 Triliun dan hingga 2019 mencapai Rp 1.643,1 Triliun. Begitu pula halnya di Kabupaten Wajo, penerimaan pajak daerah dari tahun 2015 sebesar Rp. 24,696 Milyar dan hingga 2019 mencapai Rp. 37,334 Milyar. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara dan daerah, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevalusasi kebijakan-kebijakan daerah terutama dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagai implementasi Otonomi daerah.

Pajak dikategorikan pengelolaanya menjadi pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum tahun 2014 pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah objek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dimulai sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi Basis Data dan sofcopy Peta PBB nomor BA-01/WPJ.15/KP.1001/2014 yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Watampone. Adanya pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berupa tanah untuk daerah perkotaan mempunyai nilai yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang semakin tinggi, sedangkan persediaan tanah terbatas, sementara itu untuk objek tanah di daerah perdesaan masih banyak yang belum bersertifikat sehingga potensi pembentukan objek pajak baru masih cukup luas. Objek PBB lainnya yang berupa bangunan, jumlahnya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah bangunan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, yang berarti bertambah pula kebutuhan akan tempat hunian. Menyadari akan banyaknya jumlah obyek pajak maupun luasnya wilayah kerja yang harus didata, maka dibutuhkan Teknologi dan Sistem Informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaannya. Selain itu pula proses pelayanan dan bisnis perpajakan yang harus menyesuaikan dengan perilaku masyarakat masa kini yang semakin memanfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup. Masyarakat ingin semuanya serba praktis dalam proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengelolaan dokumen-dokumen pajak.

Perkembangan dunia teknologi informasi belakangan ini semakin mempermudah manusia dalam bekerja. Penerapan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Wajo mulai dari pendataan, pendaftaran, penilaian, penagihan dan pembayaran dapat lebih mudah dilasanakan yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuarikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Sistem Informasi Terhadap Penerimaan Pbb-P2 Kabupaten Wajo (Survey pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo)"

TINJAUAN LITERATUR

Haag dan Keen (1996) pengertian teknologi informasi bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Oxford English Dictonary (OED : Teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Williams dan Sawyer (2003) bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.Martin (1999) teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memroses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi.

Menurut Alter (1992), sistem informasi adalah sistem sebagai bagian khusus dari sistem kerja ketika manusia atau mesin melaksanakan pekerjaannya menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa tertentu yang ditujukan untuk pelanggan atau pengguna. Lucas (1988) mengatakan pengertian sistem informasi adalah sebuah kegiatan dari berbagai prosedur yang terorganisisir. Jika sistem tersebut dilaksanakan, maka akan tersedia informasi yang dapat mendukung terwujudnya pengendalian dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau kelompok tertentu. Menurut Nash (1995) pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari beberapa manusia, alat teknologi atau fasilitas, media, pengendalian dan prosedur yang tujuannya menata jaringan komunikasi yang terstruktur, berkesinambungan, dan mempunyai sebuah aturan baku. Tujuannya adalah supaya dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pada pemakai data ekstern dan intern. Menurut Leitch dan Davis dalam Jogiyanto (1999), pengertian sistem informasi adalah sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang menjadi sarana untuk mempertemukan

kebutuhan transaksi harian dan hal yang mendukung operasi perusahaan, orang, atau organisasi. Hal ini bersifat manajerial dengan kegiatan berupa penyediaan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak yang bersangkutan.

Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang–undang tanpa ada balas jasa (kontra–prestasi). Pajak bersifat dapat dipaksakan. Artinya, jika wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang–undangan, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Juga, pembayaran pajak tidak mendapat balas jasa (kontra–prestasi). Artinya, para wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat sesuatu balas jasa berupa barang maupun uang meskipun telah membayar pajak. Sebagaimana halnya seorang pembeli yang menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh barang atau jasa tertentu. Namun, sebetulnya akibat pembayaran pajak itu para wajib pajak telah memperoleh manfaatnya secara tidak langsung berupa tersedianya sarana dan prasarana jalan, pelayanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Semua itu dibiayai dari penerimaan pemerintah, antara lain berasal dari pajak. Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajakyang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Suandy (2005) adalah Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak".

Menurut Hutagaol (2007), penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Suryadi (2006), penerimaan pajak ialah: Sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dari pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara tertus-menertus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris: 1) pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi dapat berpengaruh tarhadap peningkatan pelayanan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Wajo; dan 2) teknologi dan sistem informasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Wajo.

Gambar 1. Model Penelitian

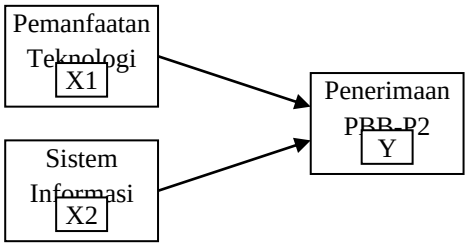

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni BAPENDA KabupatenWajo dimana berfokus pada aparat / pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.. Lokasi penelitian lokasi penelitian lokasi penelitian lokasi penelitian lokasi penelitian lokasi penelitian. Waktu

penelitian waktu penelitian waktu penelitian waktu penelitian waktu penelitian waktu penelitian waktu penelitian waktu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dari masing-masing variabel, (Ghozali,2011). Variabel yang digunakan meliputi variabelindependen yaitu kualitas aktiva produktif, likuiditas dan satu variabel dependen yaitu rentabilitas diujilah pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel berikut ini:

Tabel 1. Statistik Deskripitif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi	5	2046890398	3947009227	2926719572.2000	683533314.21381
Sistem Informasi	5	7485441119	10224951738	8841912729.8000	989172311.51656
Penerimaan PBB	5	10197324001	13068617218	11768632301.8000	1055156764.5927
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data diolah (2020).

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 1 dapat diketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap variabe yaitu 5 thn data yang berasal dari sampel pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo).

Mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Masing-masing variabel akan dijabarkan sesuai dengan data pada tabel 1 di atas sebagai berikut: 1) pemanfaatan Teknologi mempunyai nilai mean sebesar 29.267.195.722.000dengan standar deviasi (std devition) sebesar 6.835.333.1421.381. yang artinya nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengidentifikasikan hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat rendah, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal. Nilai minimalnya sebesar 2.046.890.398 dan nilai maksimum sebesar 3.947.009.227; 2) sistem Informasi variabel likuiditas diperoleh bahwa nilai mean adalah sebesar 88.419.127.298.000dengan standar deviasi (std deviation) sebesar 98.917.231.151.656yang artinya nilai mean jauh lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga mengidentifikasikan hasil sebaran data yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.

Nilai minimumnya 7.485.441.119dan nilai maksimumnya sebesar 10.224.951.738; dan 3) penerimaan PBB mempunyai nilai mean 10.224.951.738dan standar deviasi (std devition) sebesar 10.551.567.645.927. Hal ini berarti nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil yang sangat baik. Sebab apabila standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat rendah, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan menyebabkan bias. Nilai minimal penerimaan PBB sebesar 10.197.324.001dan nilai maksimumnya 13.068.617.218.

Uji asumsi klasik adalah persyaratan pengujian statistik yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linier. Model dalam penelitian ini harus bebas dari asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diujikan pada masing-masing variabel. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > α = 0,05. (Ghozali, 2006: 160).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.34423454
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.142
	Negative	-.177
Test Statistic		.177
Asymp.Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data diolah (2020).

Berdasarkan tabel output SPSS Versi 25 tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Sig (2-tailed) sebesar 0.200 lebih baesar dari 0.05. Maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogora-smimov di

atas, dapat disipulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Hasil

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemanfaatan Teknologi	.997	1.003
	Sistem Informasi	.997	1.003
a. Dependent Variable: y1			

Sumber: data diolah (2020).

Dari hasil uji tersebut, ditemukan bahwa nilai Varian Inflation Factor (VIF) dari 2variabel yaitu Kualitas aktiva produktuf dan likuiditas, lebih kecil dari 5 dan nilai Tolérancetidak kurang dari 1. maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari problem multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. metode pengujian yang digunakan Uji Glesjer.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glesjer)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.191	.508		2.343	.144
	Pemanfaatan Teknologi	.053	.023	.548	2.303	.148
	Sistem Informasi	.017	.005	.799	3.361	.078
a. Dependent Variable: ABS R1						

Sumber: data diolah (2020).

Dari output tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kualitas aktiva produktif dan likuiditas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara variabel independenkualitas aktiva produktif dan likuiditasdengan variabel dependen rentabilitas. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara kualitas aktiva produktif dan likuiditas terhadap rentabilitas apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel independenkualitas aktiva produktif dan likuiditasapakah mengalami kenaikan atau penurunan untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil analisis regresi berganda dengan nilai Standardized Coefficient pada table berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	13.045	2.767	
	Pemanfaatan Teknologi	.620	.126	.127
	Sistem Informasi	1.042	.027	.984
a. Dependent Variable: Y1				

Sumber: data diolah (2020).

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi

$$Y = \beta o + \beta 1\ X1 + \beta 2X2 + e$$
$$Y = 13.045 + 0.629 + 1.042$$

Konstanta sebesar 13.045; artinya jika Pemanfaatan teknologi dan system informasi nilainya konstan, maka penerimaan PBB(Y' yaitu sebesar 13.045.

Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologisebesar 0.620.; artinya jika pemanfaatan teknologi mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan PBB (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,620. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemanfaatan teknologi dan penerimaan PBB.

Koefisien regresi variabel system informasi sebesar1.042; artinya jika system informasimengalami kenaikan 1%, maka penerimaan PBB(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.042. Koefisien bernilai posiotif artinya terjadi hubungan positifn antara system informasi dengan penerimaan PBB-P2.

Tabel 6 menunjukkan nilai Koefisien determinasi (R2) = 0,669, yang menunjukkan bahwa variasi dari penerimaan PBB dapat dijelaskan oleh pemanfaatan teknologi dan system informasi, sebesar 66,9%, sedangkan sisanya sebesar 33,1%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Diterminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819[a]	.669	.597	.48682
a. Predictors: (Constant), x12, x11				

Sumber: data diolah (2020).

Berdasarkan hasil uji Anova atau F test terlihat bahwa nilai F lebih besar dari F hitung atau 747.413 > 9.550, dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Karena probabilitas atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,050, maka dapat dikatakan bahwa pemanfatan teknologi dan system informasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penrimaan PBB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Secara Simultan

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	354.266	2	177.133	747.413	.001[b]
	Residual	.474	2	.237		
	Total	354.740				
a. Dependent Variable: Penerimaan PBB						
b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi, Sistem Informasi						

Sumber: data diolah (2020).

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi dan system informasi berpengaruh secara signifikan terhadap penrimaan PBB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Secara Parsial

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.045	2.767		4.714	.042
	x1	.620	.126	.127	4.912	.039
	x2	1.042	.027	.984	37.999	.001
a. Dependent Variable: y1						

Sumber: data diolah (2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap penerimaan PBB pada table 8 di atas nilai t hitung = 4.912 > t table 2.353 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik pemanfaatan teknologiberpengaruhpositif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa "pemanfaatan teknologi berpengaruhpositif dan signifikan terhadap penerimaan PBB terbukti (diterima).

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh system informasi terhadap penerimaan PBB pada table 8 diatas nilai t hitung = 37.999 > t table 2.353dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik system informasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa "sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB terbukti (diterima).

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB karena terlihat dari hasil uji t diperoleh hasil t hitung lebih besar dari t table dan signifikansi kurang dari nilai probailiti. Selain itu dari hasil analisis regresi yang menunjukkan pemanfatan teknologisearah dengan penerimaan PBB yang berarti jika variabel pemanfatan teknologiditingkatkan maka penerimaan PBB akan mengalami kenaikan. Hasil peneltian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi sangat mepengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Wajo, tenaga sdm yang dilengkapi dengan sarana dan prasana sehingga realisasi penerimaabn PBB-P2 dapat tercapai dari tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan penerimaan PBB-P2.

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak bumi dan bangunan menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Menurut Wardiana (2002) teknologi informasi adalah: "Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan". Penggunaan tekhnologi informasi dalam moderenisasi perpajakan yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Pujianti (2012) menyatakan bahwa tujuan penggunaan tekhnologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e- registration, e-filling dan e-Billing Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum

adat dipungut pajak yang dikenal sebagai Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda). Selain Ipeda, pada masa itu dipungut pula 6 (enam) pajak kekayaan dan pungutan lain atas tanah dan bangunan yang menimbulkan tumpan tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi perpajakan pertama yang dimulai pada tahun 1983, antara lain dengan penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui pengundangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, maka 7 (tujuh) jenis pajak kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan mejadi PBB. Dasar hukum pelaksanaan ketujuh jenis pajak tersebut yang dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel system informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PBB karena terlihat dari hasil uji t diperoleh hasil thitung lebih besar dari t table dan signifikansi kurang dari nilai probailiti. Selain itu dari hasil analisis regresi yang menunjukkan system informasi searah dengan penerimaan PBB yang berarti jika variabel system informasi ditingkatkan maka penerimaan PBB akan mengalami kenaikan.

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bapak Ida Bagus Perang Wibawa saat diwawancarai di Kantor BKD menyebutkan bahwa : “PBBini punya karakteristik tersendiri, berbeda dengan pajak lainnya. Karena kita akan melibatkan lapis masyarakat dari yang terkecil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB karena terlihat dari hasil uji t diperoleh hasil t hitung lebih besar dari t table dan signifikansi kurang dari nilai probailiti. Selain itu dari hasil analisis regresi yang menunjukkan pemanfatan teknologisearah dengan penerimaan PBB yang berarti jika variabel pemanfatan teknologiditingkatkan maka penerimaan PBB akan mengalami kenaikan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel system informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PBB karena terlihat dari hasil uji t diperoleh hasil t hitung lebih besar dari t table dan signifikansi kurang dari nilai probailiti.

Selain itu dari hasil analisis regresi yang menunjukkan system informasi searah dengan penerimaan PBB yang berarti jika variabel system informasi ditingkatkan maka penerimaan PBB akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan agar pemanfaatan teknologi dan sistem informasi PBB-P2 pada Bapenda Kabupaten Wajo untuk lebih dikembangkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi moderen dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2. Memaksimalkan pelayanan Wajib Pajak PBB-P2 dengan memberikan kemudahan dan alternatif peroses pembayaran melalui teknologi dan sistem informasi. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo agar lebih banyak untuk menggali potensi yang masih ada di Kabupaten melalui system informasi agar masyaraka lebih memahami tentang PBB-P2, dan dapat mengoptimalkan penarikan pajak yang ada selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, "Pengertian Sistem Informasi" Yuksinau 3 Juli 2019 (https://www.yuksinau.id/pengertian-sistem-informasi/).

Ali, "Pengertian Sistem Informasi, Ciri, Komponen, dan Fungsinya" Satujam.com 3 Agustus 2013 (https://satujam.com/pengertian-sistem-informasi/).

Aprianty, R. D., & Robert L. “Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bitung”, (*Jurnal EMBA 781* Vol.4 No.1 Maret 2016).

Direktorat Jenderal Pajak, Yayasan Bina Pembangunan "*Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*" Biana Rena Pariwara, 1992. Jakarta.

Kementrian Keuangan RI, "*Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*" Dirjen Perimbangan Keuangan, 2014. Jakarta.

Lestari, M. dan Kertahadi I. S. " *Efektifitas Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara*",

Moh. N., *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)

Maxmonroe.com "Pengertian Teknologi: Arti, Manfaat, dan Jenis-Jenis Teknologi" (https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-teknologi.html).

Maxmonroe.com "Pengertian Informasi: Definisi, Fungsi, Jenis, dan Contohnya" (https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-informasi.html).

Muzaki, M. H,, Heru S., & Saiful R. Y. "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Telkom Pusat Devisi Regional V Surabaya", Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Saputro, R., N. Sujana & D. Farah A. "Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Kota Surabaya".

Sawitri, "Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektifitas Penggunaan dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo", Universitas Muhammadiyah Surakarta. 93

Suryani, L. "Teknologi Informasi, Profesionalisme Acount Representatif dan Aplikasi E-Tex terhadap Penerimaan Pajak", Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 7 No. 1, Januari 2019.